

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Menurut Prof. Dr. Winarno Surachmad, Msc, judul adalah nama yang melukiskan dengan singkat apa yang menjadi inti dari sebuah karangan, dan dengan mencantumkan judul untuk karangan ilmiah adalah memberikan deskripsi atau ungkapan yang ada tentang isi karangan yang sesungguhnya. Dengan didasari pengertian diatas, maka **INSTABILITAS POLITIK DI THAILAND PADA PEMERINTAHAN PM THAKSIN SHINNAWATRA** diangkat sebagai judul skripsi ini.¹

Selain belum pernah ditulis, mengikuti perkembangan politik yang terjadi di Thailand sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut sepaik terjang para elit politik Thailand dalam menghadapi instabilitas politik di negaranya. Instabilitas politik yang terjadi di Thailand sendiri muncul sebagai akibat dari kekacauan-kekacauan politik dan ekonomi yang tidak segera diselesaikan oleh pemerintah yang berkuasa, dalam hal ini oleh PM Thaksin Shinnawatra. Hal tersebut masih ditambah lagi dengan kuatnya kelompok-kelompok oposisi di Thailand yang semakin gencar menuntut pengunduran diri PM Thaksin Shinnawatra.

Masalah instabilitas politik sebenarnya bukan hal yang baru dalam dunia perpolitikan Thailand, akan tetapi dalam setiap permasalahan politik yang terjadi

¹ Winarno Surachmad, ED, *Paper, Skripsi, Thesis, Desertasi*, Penerbit Warsito Bandung, 1974

di Thailand, selalu ada hal-hal baru maupun hal-hal yang sifatnya khas dari setiap proses penyelesaian masalah politik di Thailand.

Atas dasar pemikiran diatas, penulis mencoba membahas mengenai Instabilitas Politik Di Thailand Pada Pemerintahan PM Thaksin Sinnawatra, serta mengetahui lebih lanjut faktor-faktor apa yang menyebabkan instabilitas politik Thailand pada masa pemerintahan PM Thaksin Shinnawatra.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Instabilitas politik di Thailand pada pemerintahan PM Thaksin Shinnawatra.
2. Untuk memenuhi syarat akhir dalam menyelesaikan studi akademis dan menyelesaikan jenjang keserjanaan S-1, pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Thaksin Shinnawatra adalah seorang pebisnis sukses di Thailand. Setelah lama Thaksin Shinawatra berkecimpung dalam bidang bisnis, ia berkeinginan untuk terjun kedalam dunia politik Thailand. Perjalanan karir politik Thaksin Shinnawatra berawal dari adanya tawaran dari ketua partai politik yang bernama Tenaga Keadilan (Phelang Tham) yaitu Chamlong Srimuang, meminta bantuan dari Thaksin Shinnawatra untuk menerima jabatan Menteri Luar Negeri atas nama

partai Phelang Tham sesuai dengan kuota menteri yang dimiliki partai tersebut. Thaksin Shinnawatra menerima jabatan Menteri Luar Negeri pada tanggal 2 November 1994 dibawah pemerintahan PM Chuan Leekpai.⁴ Pada perkembangannya Thaksin Shinnawatra memutuskan mengundurkan diri sebagai Menteri Luar Negeri setelah menjabat selama 101 hari. Thaksin juga pernah menjabat sebagai wakil rakyat pada tahun 1995.

Pada perkembangan selanjutnya Thaksin Shinnawatra pada tanggal 14 juli 1998 mendirikan partai politik yang diberi nama Thai Rak Thai (Thai Cinta Thai).⁵ Setelah mempersiapkan diri selama 3 tahun, akhirnya Thai Rak Thai memutuskan untuk ikut serta dalam pemilu tanggal 6 Januari 2001. Dengan memfokuskan program-programnya pada golongan menengah kebawah serta lebih memfokuskan pada penyelesaian masalah ekonomi Thai Rak Thai berhasil mendapatkan 248 kursi di parlemen dari jumlah 500 kursi yang ada diparlemen.⁶ Dari hasil pemilu tersebut Thaksin Shinnawatra diangkat sebagai Perdana Menteri Thailand yang ke-23 untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2001.⁷

Pemerintahan Thailand dibawah PM Thaksin Shinnawatra merupakan pemerintahan Thailand pertama yang mampu menyelesaikan masa 4 tahun pemerintahannya tanpa diganggu oleh perebutan kekuasaan maupun kudeta. Hal tersebut semakin melambungkan popularitas Thaksin Shinnawatra dengan Thai Rak Thai nya.

² www.thaigov.go.th

³ www.thairakthai.com

⁴ www.ETC.go.th

⁵ www.thaigov.go.th

Dalam kurun waktu 4 tahun pemerintahan Thailand yang dipimpin oleh PM Thaksin Shinnawatra berjalan, sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan PM Thaksin Shinnawatra sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditawarkan kepada masyarakat Thailand. Masyarakat Thailand memberi tanggapan yang cukup memuaskan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Thailand dan hal tersebut juga berimbas naiknya popularitas Thaksin di mata masyarakat Thailand.

Setelah “sukses” menjalankan periode pertama pemerintahannya, Thaksin Shinnawatra dengan Thai Rak Thainya kemudian melanjutkan kesuksesannya dalam dunia politik dengan kembali memenangkan pemilu pada tanggal 6 Februari 2005 dan kembali berhasil memenangkan kursi di Parlemen dengan suara mayoritas. Dengan kesuksesan tersebut membuat PM Thaksin Shinnawatra semakin leluasa dalam menjalankan dan meneruskan program-programnya untuk membawa Thailand menjadi salah satu negara maju dan disegani di kawasan Asia maupun Dunia.

Akan tetapi Pasca tragedi kemanusiaan di Tak Bai, Pattani, yang menelan korban nyawa sekitar 80-an demonstran pada oktober 2005 ada beragam pandangan terhadap kepemimpinan PM Thaksin Shinnawatra, baik pandangan politik domestik setempat maupun kritikan internasional karena dianggap menempuh cara-cara represif dalam menghadapi demonstran. Dalam tragedi ini, pihak Kerajaan Thailand juga turut menuai kritik karena dianggap tidak membuat pernyataan resmi atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dibawah pimpinan PM Thaksin Shinnawatra di Pattani, kecuali rasa belasungkawa

atas korban kemanusiaan tersebut.

Hal tersebut kemudian berakibat pada aktivitas ekonomi yang pada awalnya mulai hidup di daerah Thailand Selatan terutama di sektor pariwisata kembali lumpuh karena munculnya ancaman-ancaman keamanan yang banyak menghantui warga, tercatat selama tahun 2004 hingga Januari 2005, sekitar 570 orang meninggal dunia di daerah konflik.⁶ Situasi ini belum mampu dinormalkan oleh pemerintah PM Thaksin Shinawatra, kebijakan-kebijakan Thaksin Shinawatra dianggap kurang adil terhadap warga dan merembet mempengaruhi kehidupan keagamaan antara penganut Islam dan penganut Budha yang selama ini cukup baik. Bahkan, ketidakmampuan PM Thaksin Shinawatra menghentikan dengan segera tindak kekerasan di Thailand Selatan sempat membuat “ketegangan politik baru” dan menodai kebersamaan ASEAN dalam memerangi terorisme yang segera diprotes Kuala Lumpur dan Jakarta, ketika menuduh bahwa para militan Islam di Thailand Selatan mendapat latihan dan dikendalikan dari pemimpin yang ada di Malaysia dan Indonesia.

Ancaman dari “Front Pembebasan Pattani Bersatu” yang bersumpah akan membalas tragedi aksi unjuk rasa di Tak Bai terus menghantui pemerintah Thailand dibawah PM Thaksin Shinawatra, sehingga aktivitas warga di Thailand Selatan dikontrol sangat ketat dengan harapan konflik segera berakhir.

Permasalahan yang terjadi di daerah Thailand Selatan/ Pattani merupakan permasalahan utama dalam upaya mencapai proses integrasi nasional di Thailand. Hal ini pada dasarnya disebabkan kekecewaan etnis Melayu di wilayah Thailand

⁶ www.kompas.com

Selatan atas kebijakan pemerintah pusat. Sumber kekecewaan masyarakat Pattani/ Thailand Selatan tersebut antara lain dikarenakan; *pertama* adalah semakin termarginalkannya mereka dengan identitas agama Islam dari agama penduduk Thailand yang mayoritas beragama Budha, yang menjadikan mereka berbeda. Yang *kedua* adalah kecilnya peluang yang diberikan kepada mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mereka merasa tersisihkan, dan hal inilah yang mendorong mereka untuk bergabung dengan gerakan komunis di tahun 1960-an dan 1970-an. Disamping itu, mereka tidak memiliki peluang yang sama untuk duduk di dalam pemerintahan, di mana sangat sedikit muslim Melayu yang direkrut sebagai pegawai pemerintah. Bahkan perilaku pegawai pemerintah yang ditempatkan di selatan seringkali bersikap memusuhi penduduk muslim disana. Ditambah lagi dengan tingkat kekerasan aparat pemerintah di Thailand Selatan yang sangat tinggi, dengan dalih untuk menjaga ketertiban, semakin menimbulkan kekecewaan Muslim Pattani.⁷

Kekecewaan tersebut kemudian terorganisir ke dalam sebuah bentuk pergerakan, yaitu United Pattani Freedom Movement, yang menonjol di tahun 1970-an. Pergerakan ini mendapat dukungan yang dari luar negeri, termasuk Libya, juga dari masyarakat sekitar Kelantan, Kedah, Trengganu. Pemerintah Malaysia juga tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Thailand untuk menumpas gerakan ini.⁸ Namun dukungan ini menjadi semakin menurun di tahun 1980-an, terutama disebabkan oleh kemahiran diplomasi pemerintah Thailand

⁷ Azizah Nur, Muslim Pattani di Thailand, Dalam Seminar Regional "Muslim Pattani: Sebuah Keinginan kebangkitan Islam di Thailand Selatan", Rabu 22 Maret. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁸ Ibid

untuk mengalihkan dukungan ke pihaknya di bawah bendera penegakan kedaulatan dan integrasi nasional. Melalui prinsip non-intervensi dalam ASEAN, negara-negara Asia Tenggara tidak mampu mencampuri urusan politik dalam negeri Thailand, terutama untuk memberikan dukungan kepada Muslim Pattani, ditambah lagi banyak negara-negara ASEAN sendiri yang juga memiliki permasalahan serupa dalam proses integrasi nasional masing-masing.

PM Thaksin Shinnawatra juga mendapatkan masalah dari kebijakannya dalam pemberantasan narkoba dengan cara yang terlalu represif. Suatu hal yang juga menjadi santapan empuk untuk terus mendapatkan kritikan dari kelompok oposisi. Pemerintah Thailand mendapat banyak kritikan dari dunia Internasional yang mengatakan pemerintah Thailand dibawah pimpinan PM Thaksin Shinnawatra ini telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap warga Thailand. Tercatat selama pemerintahan Thailand di bawah PM Thaksin Shinnawatra menjalankan kebijakan pemberantasan narkoba secara represif tersebut tidak kurang menewaskan 1.763 orang.⁹ Dari jumlah tersangka yang meninggal dunia atas kebijakan pemerintah tersebut, membuat pemerintah Thailand banyak mendapat kritikan dari dalam negeri maupun dunia internasional, seperti pernyataan dari pihak oposisi di parlemen Thailand dan pernyataan yang dilontarkan oleh Sekjen PBB Khofi Anan yang mengatakan bahwa “pemerintahan Thailand di bawah PM Thaksin Shinnawatra membuat tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia atas warga Thailand”.¹⁰

Dengan sedikit permasalahan diatas saja sudahnya cukup...

⁹ www.Thairat.com

¹⁰ Lanthong Tasenai, *Thaksin Shinnawatra Mata Melihat Langit Kaki Mulai Memurun*, Nobelbook, Bangkok, 2004

Thailand, khususnya yang berada di Thailand Selatan untuk segera mengganti kepemimpinan PM Thaksin Shinnawatra. Hal tersebut mengingat sebelum rezim PM Thaksin Shinnawatra belum pernah terjadi konflik vertikal antara warga dan pemerintah yang menelan korban begitu banyak, maupun konflik horizontal antar penganut agama. Pasca tragedi Tak Bai-Pattani tersebut, berbagai upaya para politisi dari partai oposisi dan dari kelompok-kelompok oposisi di Thailand untuk terus mencitra-negatifkan pemerintah Thailand dibawah PM Thaksin Shinnawatra dengan tujuan untuk menghentikan atau mengakhiri kekuasaan PM Thaksin Shinnawatra.

Pemerintahan Thailand dibawah PM Thaksin Shinnawatra kemudian mengalami masa-masa kemerosotan yang terjadi pada sekitar akhir periode I dan awal periode II pada masa pemerintahannya. Banyaknya masalah yang melanda pemerintah Thailand dibawah PM Thaksin Shinnawatra, seperti masalah penyelesaian konflik gerakan separatis di Thailand Selatan hingga sampai akhir periode pemerintahan Thailand dibawah PM Thaksin Shinnawatra masalah tersebut semakin bertambah rumit, dari kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah mengakibatkan banyaknya korban jatuh sakit atau meninggal dunia dari pihak pemerintah sendiri maupun dari warga setempat. Bahkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dibawah pimpinan PM Thaksin Shinnawatra tersebut tidak menunjukkan jalan keluar yang baik untuk penyelesaian masalah tersebut, dari kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap penyelesaian masalah tersebut dianggap gagal oleh kubu oposisi dan warga muslim yang berada di Thailand Selatan, masalah tersebut

sangat mempengaruhi citra baik dalam kinerja pemerintahan Thailand dibawah PM Thaksin Shinnawatra.

Hal tersebut kemudian berkembang menjadi aksi-aksi unjuk rasa, boikot sebagai wujud ketidakpuasan terhadap kinerja pemerinta Thailand dibawah PM Thaksin Shinnawatra. Kehidupan politik di Thailand-pun pada akhir tahun 2005, terlebih setelah Thaksin memenangkan pemilu bulan oktober dengan suara mayoritas, banyak diwarnai dengan aksi-aksi unjuk rasa, demonstrasi maupun pemboikotan serta aksi walk-out yang dilakukan oleh partai-partai oposisi Thailand di parlemen. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan/ kelompok di Thailand sebagai wujud ketidakpuasan masyarakat Thailand terhadap penguasa yang pada akhirnya menuntut agar PM Thaksin Shinnawatra mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri Thailand.

Aksi-aksi menentang PM Thaksin Shinnawatra mulai muncul sejak bulan desember 2005 dan semakin membesar terlebih setelah “penasehatnya” Chamlong Srimuang, eks pemimpin partai Palang Darma (juga mentor Thaksin Shinnawatra dalam dunia politik) ikut bergabung dengan kelompok yang menuntut pengunduran diri Thaksin dari kursi PM Thailand. Termasuk juga mantan Kepala Kepolisian Santiprabob, serta tokoh media Sondhi Limthongkul. Tuntutan pengunduran diri Thaksin Shinnawatra ini dimulai oleh para pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, guru, dan warga kelas menengah yang menilai PM Thaksin Shinnawatra dan pemerintahannya korupsi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang.

Menghadapi banyaknya tekanan aksi-aksi unjuk rasa menuntut pengunduran diri dari kursi Perdana Menteri Thailand. PM Thaksin Shinawatra mengambil kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya justru membawa Thailand kedalam situasi instabilitas politik yang mengancam integrasi Thailand serta sangat berpotensi memunculkan konflik horizontal maupun vertikal diantara kelompok-kelompok warga Thailand.

Aksi-aksi unjuk rasa yang dipicu oleh sikap PM Thaksin Shinawatra tersebut, yang tidak mau dikritik dalam keputusannya seputar penjualan saham perusahaan Telekomunikasi keluarganya, yaitu Shin Corp. kepada perusahaan Temasek (Singapura), menuai kritik tajam. Namun PM Thaksin Shinawatra justru membalas kritikan tersebut dengan menggugat salah satu tokoh media Sondhi Limthongkul dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hal yang tidak populer ini justru semakin memperbesar aksi-aksi massa menentang dirinya.

Pasca dijualnya Shin Corp. tersebut seolah-olah dijadikan oleh para penentang Thaksin maupun pihak oposisi untuk kemudian terus membeberkan aib pada masa pemerintahan PM Thaksin Shinawatra. Kebijakan-kebijakan Thaksin dalam menangani gerakan separatis di Thailand Selatan dengan cara-cara represif dinilai oleh kelompok oposisi sebagai sebuah kegagalan total.

Banyak kalangan mulai mengkhawatirkan aksi unjuk rasa yang terus terjadi di Thailand menjadi tidak terkendali serta berakhir dengan kekerasan dan berdarah-darah seperti yang terjadi pada tahun 1976 dan tahun 1992.

Makin lama aksi-aksi unjuk rasa semakin membesar serta sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik Thailand. Hal tersebut menimbulkan

instabilitas politik dalam negeri Thailand, hal ini dapat terlihat dari sikap PM Thaksin Shinawatra membubarkan Parlemen pada tanggal 24 februari 2006 dan menggelar Pemilu ulang pada tanggal 2 april 2006.

Setelah PM Thaksin Shinawatra memutuskan membubarkan parlemen dan mempercepat pemilu, oposisi Thailand kemudian menyerukan agar setiap komponen masyarakat memboikot pemilu tersebut dan kemudian menyerukan kepada PM Thaksin Shinawatra mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri. Sebelumnya oposisi meminta Thaksin untuk mengubah undang-undang yang pada akhirnya di tolak PM Thaksin Shinawatra.¹¹

Menghadapi situasi-situasi yang semakin menyudutkan dirinya, PM Thaksin Shinawatra selain menawarkan referendum, Thaksin juga memberikan jaminan bahwa jika dirinya mampu memenangkan referendum tersebut maka ia akan melakukan amandemen UU selama 15 bulan dan melakukan pemilu setelahnya. PM Thaksin Shinawatra juga menyatakan akan mengundurkan diri jika dirinya tidak mendapatkan lebih dari 50 % suara dalam referendum tersebut. Suatu opsi yang kemudian juga ditolak oleh oposisi.¹²

Oposisi Thailand menyatakan akan terus berunjuk sampai PM Thaksin Shinawatra mengundurkan diri. Berbagai kelompok oposisi Thailand terus berkumpul untuk melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap PM Thaksin Shinawatra dan berjanji akan tetap berunjuk rasa di ibukota sampai PM Thaksin Shinawatra meletakkan jabatan. Dipimpin oleh Aliansi Rakyat bagi demokrasi, demonstran telah berencana akan mengadakan rapat besar di lapangan

¹¹ Kompas, Selasa, 7 maret 2006

¹² *Ibid*

Sanam Luang, Bangkok. Tempat itu menjadi kancah 3 demonstrasi berdarah pro demokrasi dalam tahun-tahun 1973, 1976 dan 1992.

Setelah terjadi demo di jalan-jalan (pada periode desember-maret) untuk memprotes agar PM Thaksin meletakkan jabatan, PM itu segera membubarkan parlemen 24 Februari dan menyerukan pemilu 2 April 2006, 3 tahun lebih awal dari rencana, dalam usaha untuk meredakan krisis. Parta-partai oposisi Thailand menyatakan akan memboikot pemilu. Mereka menuduh PM Thaksin korupsi dan mengancam keluarganya yang menjual saham bernilai hampir dua milyar dolar dari bisnis telkom (Shin Corp.) dengan bebas pajak.¹³

Semua usaha PM Thaksin Shinnawatra untuk menyelamatkan pemerintahannya, seperti meminta kepada para pendukungnya untuk membanjiri Kantor PM dengan surat-surat dukungan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah rakyat masih mendukungnya untuk bertahan. Hal tersebut rupanya tidak mempengaruhi niat oposisi untuk terus mendesak agar PM Thaksin Shinnawatra untuk mundur. Pada hari minggu tanggal 5 maret 2006, sekitar 60.000 pengikut Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) melakukan demo anti-Thaksin. Mereka adalah pengikut Partai Palang Dharma, yang didirikan Chamlong Srimuang.¹⁴

Dalam pernyataannya Chamlong Srimuang menyatakan “mulai hari senin tanggal 6 maret 2006 dan seterusnya, pengikutnya bersama dengan pengikut PAD

¹³ <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2006-03/2006-03-05-voa9.cfm>

¹⁴ *Ibid*

akan melakukan demo anti-Thaksin setiap hari hingga berhasil memaksa Thaksin mundur sebelum 2 april 2006”.¹⁵

Aksi tersebut berlangsung selama 24 jam dan diikuti oleh pengikut Partai Palang Darma, yang pengikut utamanya adalah biarawan dan biarawati Budha. Aksi tersebut juga didukung oleh kelas pekerja di Bangkok pada sore hari setelah mereka pulang dari tempat kerja.

Kelompok-kelompok oposisi Thailand pada tanggal 23 maret 2006, mengeluarkan pernyataan bahwa mereka memberikan tenggat waktu dua hari kepada Perdana Menteri Thaksin Shinawatra agar segera meletakkan jabatan. Tenggat waktu itu dinyatakan oleh kelompok-kelompok oposisi yang dipimpin oleh Partai Aliansi Rakyat untuk Demokrasi.

Kelompok-kelompok oposisi juga menyerukan kepada rakyat Thailand agar ikut serta dalam pawai akbar 25 Maret 2006. Mereka juga mengimbau rakyat agar memboikot pemilu 2 April 2006 dan mengabaikan seruan PM Thaksin Shinawatra. Kelompok-kelompok oposisi Thailand sendiri sudah lima kali menggerakkan demonstrasi besar-besaran di Bangkok

Pemimpin oposisi Thailand Abhisit Vejjajiva menyatakan bahwa “kekacauan politik merupakan satu-satunya hasil dari pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 april 2006 tersebut”.¹⁶ Pemilihan umum tersebut digunakan PM Thaksin Shinawatra untuk menghentikan gelombang demonstrasi dari kelompok oposisi yang berusaha menjatuhkan pemerintahannya.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Reuters, *ANT*, Kompas, 31/3/06,
<http://www.beritaindonesia.co.id/data/arsip/2006/03/index.php?page=10>

Tiga partai oposisi utama Thailand sendiri dari jauh-jauh hari sudah menyatakan memboikot pelaksanaan pemungutan suara. Kursi parlemen dari kalangan oposisi akan tetap kosong, sehingga Thai Rak Thai di bawah pimpinan PM Thaksin Shinawatra tidak akan memiliki oposisi di parlemen, dan karenanya tidak memiliki hak untuk membentuk pemerintahan yang konstitusional. Sebuah kekacauan-kekacauan yang semakin menyulitkan posisi PM Thaksin Shinawatra untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pada tanggal 2 april 2006, 2 buah bom meledak di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) di daerah Pattani Thailand Selatan. Bom itu meledak ketika rakyat di daerah tersebut memberikan suara dalam pemilu 2 april 2006, empat orang terluka dalam insiden tersebut. Ledakan bom itu sendiri menunjukkan PM Thaksin Shinawatra telah gagal mengatasi kekerasan separatisme di Thailand Selatan, disamping itu insiden tersebut jelas sangat merusak citra PM Thaksin Shinawatra. Banyak pihak menyalahkan PM Thaksin atas kegagalan mengatasi konflik di wilayah Thailand Selatan. Selama kurang lebih dua tahun konflik di daerah tersebut telah menewaskan lebih dari 1.100 orang.

Ledakan bom juga terjadi di propinsi Narathiwat, beberapa saat setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 15.00, 2 buah bom meledak di propinsi tersebut. Ledakan bom tersebut melukai dua petugas keamanan, sebelumnya polisi berhasil menjinakkan sebuah bom kecil di dekat sebuah TPS propinsi Pattani.

Tiga propinsi di Thailand Selatan (Narathiwat, Yala, dan Pattani) masih menjadi ancaman besar bagi PM Thaksin Shinnawatra, wilayah ini juga merupakan basis massa kubu oposisi.

Juga sempat terjadi ketegangan di Thailand Selatan yang dipicu lantaran pemimpin Partai Demokrat (oposisi) Abhisit Vejjajiva dipukuli massa PM Thaksin Shinnawatra. Pemukulan itu terjadi saat Abhisit ambil bagian dalam aksi pawai di Chiang Mai, aksi pemukulan itu sendiri juga terekam oleh kamera televisi.¹⁷

Aksi kekerasan dan boikot dari kubu oposisi terhadap pemilu dapat menimbulkan krisis konstitusi di Thailand, di tambah lagi jika para calon legislator (caleg) Partai Thai Rak Thai sendiri tidak mampu mengumpulkan batas minimum 20 % suara. Hal ini didasarkan pada konstitusi Thailand yang menyatakan 500 anggota parlemen harus dipilih terlebih dahulu sebelum pemerintahan baru terbentuk. Maka dengan pemilu yang dipercepat, dikhawatirkan tidak menghasilkan 500 anggota dikarenakan adanya aksi boikot dari pihak oposisi.

Tanda-tanda krisis konstitusi sendiri semakin tampak, hal ini dapat terlihat dari sebuah daerah pemilihan di Bangkok tidak memiliki caleg sama sekali, dikarenakan seorang caleg dari Thai Rak Thai telah didiskualifikasi beberapa saat menjelang pemungutan suara.

Dibanyak daerah pemilihan Thailand Selatan, caleg-caleg dari Thai Rak Thai kemungkinan besar gagal meraih 20 % suara. Selain itu oposisi dan Aliansi

¹⁷ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0604/03/int01.htm>

Rakyat untuk Demokrasi mendesak para pemilih untuk bersikap abstain dengan mencoblos kotak kosong dalam surat suara.

Gelombang aksi unjuk rasa menuntut pengunduran diri Thaksin kemudian melanda Thailand. Puncaknya, tanggal 4 April 2006, Thaksin mengumumkan pengunduran dirinya. Namun, tanggal 23 Mei 2006 secara tiba-tiba Thaksin menyatakan kembali menjabat sebagai PM. Sejak kembalinya Thaksin, situasi politik di Thailand dilanda ketidakpastian.

Hal-hal tersebut dipandang oleh berbagai kalangan di Thailand dapat menimbulkan instabilitas politik Thailand jika masih mempertahankan Thaksin untuk duduk sebagai PM Thailand. Hal tersebut ditunjukkan oleh sebagian besar rakyat Thailand khususnya kelompok-kelompok oposisi dengan protes-protes dalam skala kecil maupun besar yang kemudian berubah menjadi gelombang demonstrasi besar-besaran yang semakin memuncak pasca dijualnya Perusahaan Telekomunikasi (Shin Corp.). selain kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan PM Thaksin Shinnawatra pada masa pemerintahannya, maupun kebijakan-kebijakan / keputusan-keputusan dalam usahanya untuk mempertahankan kekuasaannya ditambah dengan protes-protes yang semakin meluas secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada terjadinya instabilitas politik Thailand.

Keputusan PM Thaksin Shinnawatra untuk merubah sistem pemerintahannya menjadi lebih efektif dan efisien guna kemajuan Thailand adalah keputusan yang tepat dengan memprioritaskan kepada wilayah Thailand Selatan, namun dengan latar belakangnya sebagai seorang pelaku bisnis yang sukses telah membutakan matanya bahwa negara bukanlah perusahaan, penerapan kebijakan

dalam negara layaknya yang diterapkan Thaksin dalam menjalankan perusahaannya menjadi tidak berjalan karena Thaksin terbentur oleh pemikiran tradisional rakyat Thailand Selatan. Akibat dari hal ini berbagai kebijakannya justru menjadi tidak efektif bahkan dapat dianggap kemunduran dari pemerintah sebelumnya.

Kebijakan-kebijakan yang berakibat munculnya sikap pro-kontra dari berbagai kalangan di Thailand, yang kemudian berubah menjadi suatu kondisi ketidakstabilan politik dalam negeri Thailand pada akhirnya memaksa militer Thailand melakukan kudeta pada tanggal 19 September 2006 untuk mengakhiri gejolak politik yang terjadi di Thailand.

D. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka dalam tulisan ini dapat ditarik suatu permasalahan :

Faktor-faktor apa yang menyebabkan instabilitas politik di Thailand pada pemerintahan PM Thaksin Shinnawatra?

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mendeskripsikan jawaban dari rumusan masalah yang telah diungkapkan diatas, penulis menggunakan konsep sebagai alat bantu. "Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu."¹⁸

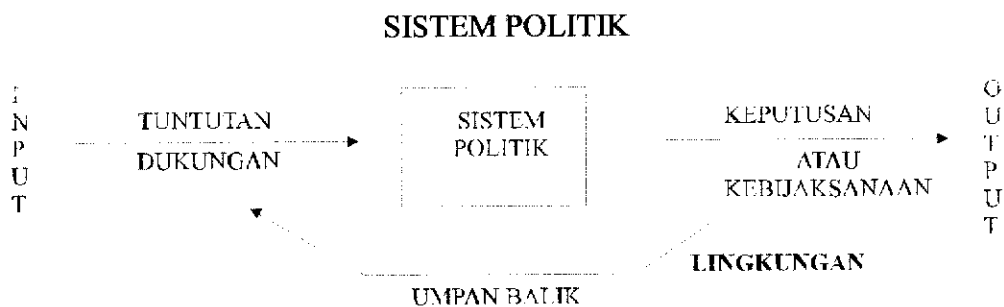
¹⁸ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES

Konsep yang dipakai penulis adalah Konsep Sistem Politik. Studi politik berusaha memahami bagaimana keputusan-keputusan yang otoritatif atau sah dibuat dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat, berusaha memahami kehidupan politik dengan melihat seginya satu per-satu, kita dapat mempelajari sifat-sifat dan akibat-akibat dari praktek-praktek politik seperti manipulasi, propaganda, dan kekerasan; dan menyelidiki berfungsinya lembaga-lembaga politik seperti partai politik, voting, kelompok kepentingan, dan pemerintahan, kita dapat meneliti struktur tempat terjadinya praktek-praktek ini. Sistem tingkah laku politik merupakan suatu unit tersendiri, maka akan terlihat bahwa adanya bermacam inputlah yang menjamin terus bekerjanya sistem. Yang terjadi dalam sistem itu adalah input-input ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem itu berada. Rumusan ini sangat sederhana tetapi juga cukup memadai bila digunakan untuk menjelaskan berbagai hal : input 2 sistem atau proses politik 2 output.

Hubungan ini dapat terlihat dalam gambar :

Gambar 1.1

Skema :



Sumber : Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews, *Perubahan Sistem politik*, Gadjah Mada

University Press, Yogyakarta, 1997.hal.5

Sistem politik memiliki konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat yaitu keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan otoritatif yang disebut sebagai output. Untuk tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan input-input. Input dapat berbentuk tuntutan atau dukungan dari masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah. Dalam hubungan ini kita dapat meneliti bagaimana mengidentifikasi input-input dan kekuatan-kekuatan yang membentuk dan merubah input-input itu menjadi output-output, menggambarkan kondisi umum yang dapat memelihara proses-proses itu, dan menarik hubungan antara output-output dengan input-input berikutnya dalam sistem tersebut. Bekerjanya suatu sistem politik karena adanya banyak hal yang terjadi di dalam sistem tersebut yang merupakan akibat dari upaya anggota-anggota sistem tersebut untuk menanggapi lingkungannya yang selalu berubah. Jika anggota-anggota suatu sistem mendapat tekanan dari lingkungan maka ia akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan itu bila tidak ingin hancur.

Tuntutan dan dukungan merupakan input dalam sistem politik, sebagai bahan mentah atau informasi yang harus diproses oleh sistem itu nantinya. Bila tuntutan-tuntutan itu disalurkan dengan suatu usaha yang diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat maka tuntutan-tuntutan itu telah menjadi input. Tuntutan-tuntutan bisa muncul karena adanya rasa tidak puas dari masyarakat atas apa yang ada.

Input-input berupa tuntutan tidaklah memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik. Input tuntutan itu hanyalah bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk-akhir, yang disebut keputusan. Input lain yang juga

dibutuhkan adalah input dukungan. Bila tuntutan ingin ditanggapi, anggota-anggota sistem yang ingin mempengaruhi proses-proses yang relevan dan mereka yang memperjuangkannya menjadi keputusan yang mengikat harus mampu memperoleh dukungan dari pihak-pihak lain dalam sistem tersebut. Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan. Untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsinya, sistem itu juga memerlukan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan dan merintangi suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul di dalamnya dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya.

Sebagaimana analisa melalui sistem politik, kita berusaha untuk memahami bagaimana kebijakan itu dibuat dan dilaksanakan. Dalam hal ini penulis mencoba untuk memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan instabilitas politik pada pemerintahan PM Thaksin Shinnawatra, serta menyelidiki keterkaitan atau berfungsinya lembaga-lembaga politik seperti kelompok kepentingan, partai politik, dan lain-lain.

Seperti yang dijelaskan diatas, input dalam sistem politik adalah berupa tuntutan dan dukungan. Ketika PM Thaksin Shinnawatra mengeluarkan kebijakan-kebijakan antara lain; menggunakan cara-cara represif dalam menyelesaikan persoalan di Thailand Selatan, dan keputusannya untuk menjual Shin Corp. bermunculan aksi-aksi protes dan unjuk rasa dari masyarakat Thailand sebagai bentuk ketidakpuasan atas kebijakan-kebijakan tersebut. Aksi-aksi protes dan unjuk rasa serta aksi-aksi boikot yang dilakukan partai-partai oposisi Thailand yang semula sebagai bentuk kekesalan masyarakat Thailand tersebut kemudian

menghasilkan pada akhirnya bermuara pada satu tuntutan, yaitu pengunduran diri PM Thaksin Shinawatra. Hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai input, yaitu tuntutan dari masyarakat warga negara Thailand. Tuntutan dari sebagian masyarakat Thailand tersebut kemudian banyak mendapatkan dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan di Thailand serta dari pihak-pihak lain, misalnya kelompok-kelompok oposisi serta tokoh-tokoh politik Thailand, seperti Chamlong Srimuang dan Sondhi Limthongkul dikategorikan sebagai dukungan.

Tuntutan-tuntutan dan dukungan warga Thailand tersebut kemudian di diproses kedalam sebuah sistem politik yang ada di Thailand. Dengan melibatkan elemen-elemen yang ada dalam kehidupan politik dalam negeri Thailand; seperti Parlemen, partai politik, kelompok kepentingan, bahkan meminta pendapat Raja Bhumibol Aduljadej. Selain terjadi ditingkat (Parlemen) atas tuntutan dan dukungan dari masyarakat Thailand juga mengalami tarik ulur dilapangan. Dimana kondisi instabilitas politik yang terjadi dalam negeri Thailand tersebut juga mengalami perdebatan yang serius antara pihak pemerintah dalam hal ini PM Thaksin Shinawatra dengan kelompok-kelompok oposisi yang dipimpin Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi.

Setelah berbagai perdebatan baik ditingkat parlemen maupun dijalanan/lapangan, input tersebut respon pemerintah Thailand dibawah PM Thaksin Shinawatra dengan membubarkan perlemen pada tanggal 24 februari 2006 dan mempercepat Pemilu pada 2 April 2006.

Setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, kondisi politik dalam negeri Thailand yang semakin tidak menentu memaksa semua jalan yang dilakukan pemerintah Thailand dibawah PM Thaksin Shinawatra untuk mempertahankan kekuasaannya mengalami jalan buntu. Oposisi di Thailand semakin gencar menuntut pengunduran diri PM Thaksin Shinawatra. Oposisi Thailand bahkan mengeluarkan ancaman pemboikotan Pemilu oleh partai maupun kelompok-kelompok oposisi. Hal ini dapat disebut juga umpan balik (*feedback*) terhadap kebijakan-kebijakan PM Thaksin Shinawatra. Menghadapi tekanan-tekanan yang mengancam kelanjutan kekuasaan PM Thaksin Shinawatra, pemerintah Thailand dibawah PM Thaksin Shinawatra tetap melaksanakan pemilu, yang pada pelaksanaannya dihantui berbagai teror dari kelompok-kelompok separatis Thailand.

Pada akhirnya pun pemerintahan Thailand dibawah PM Thaksin Shinawatra jatuh setelah militer Thailand melakukan Kudeta pada tanggal 19 September 2006.

Penulis juga menggunakan definisi konseptual dan definisi operasional untuk menjelaskan konsep dari instabilitas. Definisi *konseptual* adalah definisi yang menggambarkan konsep dengan menggunakan konsep-konsep lain.¹⁹ *Instabilitas politik Thailand* secara konseptual didefinisikan ketidakmampuan dari penguasa-penguasa untuk menghadapi tantangan-tantangan dari kekuatan-kekuatan internal maupun eksternal dengan melihat dari sejumlah faktor.²⁰ Antara lain dapat terlihat dari sebagai pergantian pemerintahan/ pergantian rezim, kekacauan/ kekerasan politik yang disebabkan oleh revolusi, *coup d'etat* dan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yahya Muhaimin, Colin McAndrews, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik- cet. 7*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995

perang sipil/ perang saudara maupun kekacauan politik dalam negeri. Jika dikaitkan dengan pokok permasalahan yang diteliti, dalam hal ini instabilitas politik di Thailand; maka instabilitas politik disini berarti suatu kondisi dimana terjadi ketidakstabilan politik di Thailand yang ditandai dengan maraknya aksi-aksi unjuk rasa menentang pemerintah, pertentangan-pertentangan ditingkat elite yang mulai memanas serta kekhawatiran dari berbagai kalangan akan turut campurnya militer dalam perpolitikan Thailand (akhirnya terbukti dengan terjadinya kudeta yang dilakukan militer pada tanggal 19 september 2006). Hal-hal ini muncul sebagai akibat sikap pro dan kontra warga serta kelompok-kelompok masyarakat di Thailand mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Thailand di bawah PM Thaksin Shinnawatra serta pengaruh dari kuatnya golongan oposisi dan turut campurnya militer Thailand dalam perpolitikan dalam negeri.

Definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mencandra (mendeskripsikan) kegiatan yang harus dilakukan kalau kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep. Definisi operasional juga berarti menjabarkan prosedur pengujian yang memberikan kriteria bagi penerapan konsep itu secara empiris. Oleh karena itu definisi operasional merupakan jembatan antara tingkat konseptual-teoritis dengan tingkat observasional-empiris.⁴¹ Sesuai dengan definisi konseptual yang telah disebutkan diatas, maka instabilitas sesuai dengan definisi *operasional* adalah aksi-aksi unjuk rasa, demonstrasi maupun boikot yang dilakukan oleh partai oposisi, masyarakat

²¹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan metodologi*, LP3ES

serta kelompok-kelompok oposisi di Thailand. Instabilitas politik di Thailand dapat terlihat antara lain dari:

- Pemboikotan serta aksi walk-out yang dilakukan oleh partai-partai oposisi Thailand di parlemen.
- PM Thaksin Shinnawatra membubarkan Parlemen pada tanggal 24 februari 2006 dan menggelar Pemilu ulang pada tanggal 2 april 2006.
- Pemboikotan pemilu yang diprakarsai oleh golongan-golongan oposisi dibawah Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi pimpinan Abhisit Vejjajiva.
- Ledakan bom pada tanggal 2 april 2006 di tempat pemungutan suara di daerah pattani dan Narathiwat. Hal ini dilakukan oleh kelompok separatis untuk menggagalkan pemilu tersebut.
- Kembalinya Thaksin Shinnawatra menduduki jabatan Perdana Menteri Thailand, estela sebelumnya sempat mengundurkan diri.
- Kudeta militer tanggal 19 September 2006.

F. Hipotesa

Dari pokok permasalahan diatas serta dengan menggunakan konsep seperti yang disebutkan diatas, maka dapat diambil jawaban sementara bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Instabilitas politik di Thailand pada masa pemerintahan PM Thaksin Shinnawatra adalah:

A I. kebijakan politik:

1. Kebijakan PM Thaksin Shinnawatra dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan (Pattani) yang bersifat represif.

II. kebijakan ekonomi:

1. Kebijakan PM Thaksin Shinnawatra dalam penjualan saham (Shin Corp.) kepada perusahaan telekomunikasi Singapura (Temasek).

B. Kuatnya golongan/ kelompok-kelompok oposisi di Thailand

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dari tulisan ini yaitu pada masa pemerintahan PM Thaksin Shinnawatra periode II, yaitu antara tahun 2004-2006. Dimana pada masa tersebut Pemerintahan PM Thaksin Shinnawatra mulai disorot oleh banyak kalangan di Thailand, setelah pada periode I Pemerintahannya dapat dilalui dengan baik oleh PM Thaksin Shinnawatra dan pemerintahannya.

H. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi pustaka (*library research*). Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan literatur-literatur lain yang relevan dengan tema penulisan serta mengakses data internet. Serta referensi yang bersumber dari artikel-artikel.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Keseluruhan dari bab ini adalah **PENDAHULUAN** yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini, akan mendeskripsikan mengenai **SISTEM POLITIK DI THAILAND** yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Thailand (sejarah singkat Thailand, sistem sosial politik dan pemerintahan Thailand, partai politik, dll).

BAB III : Dalam bab ini, akan membahas mengenai **KEKUATAN OPOSISI DI THAILAND**, termasuk di dalamnya juga akan membahas mengenai turut campurnya militer dalam masalah politik Thailand; juga mengenai **KUDETA** yang dilakukan militer Thailand pada tanggal 19 September 2006.

BAB IV : Dalam bab ini, membahas mengenai **KEBIJAKAN-KEBIJAKAN (POLITIK, EKONOMI) PM Thaksin Shinawatra** dan kuatnya oposisi di Thailand sebagai faktor penyebab Instabilitas politik di Thailand.

BAB V : KESIMPULAN